

**LAPORAN UMUM TAHUNAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
SERTA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT  
TAHUN 2018**



**DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I           PENDAHULUAN .....	1
A.       Latar Belakang .....	1
B.       Landasan Hukum .....	4
C.       Kebijakan Umum .....	5
D.       Arah Kebijakan .....	13
BAB II        PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....	17
A.       Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	17
1.    Jenis Pelayanan Dasar .....	17
2.    Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	18
3.    Target Pencapaian SPM .....	21
4.    Realisasi .....	23
5.    Alokasi Anggaran .....	25
6.    Dukungan Personil .....	25
7.    Permasalahan dan Solusi .....	26
B.       Bidang Perumahan Rakyat .....	26
1.    Jenis Pelayanan Dasar .....	26
2.    Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat .....	27
3.    Target Pencapaian SPM .....	27
4.    Realisasi .....	28
5.    Alokasi Anggaran .....	29
6.    Dukungan Personil .....	29
7.    Permasalahan dan Solusi .....	29
BAB III       PROGRAM DAN KEGIATAN .....	31
BAB IV        PENUTUP .....	40
LAMPIRAN	

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sampurasun

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai harapan.

Sebagaimana kita ketahui, Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Perumahan Rakyat merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk mengetahui penerapan dan ketercapaian standar pelayanan minimal pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan rakyat di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2018.

Dengan adanya laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dapat diketahui sejauh mana pencapaian pelayanan minimal sudah diberikan kepada masyarakat sehingga dapat diketahui yang perlu diperbaiki untuk program ke depan.

Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang serta Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kami menghaturkan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan yang ada. Semoga laporan ini ada manfaatnya.

*Amin Yaa Robbal ' Aalamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwakarta, 31 Desember 2018

**Kepala**  
Dinas Tata Ruang dan Permukiman  
Kabupaten Purwakarta,

**DR. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd**

NIP. 19680911 199302 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat dan pemerintahan.

SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. SPM ini ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam teknis penyusunannya, SPM harus bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Pemerintah Pusat (Kementerian/LPNK) telah menetapkan 15 SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 100/1023/SJ tentang

Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Peraturan lain yang terkait langsung dengan standar pelayanan minimal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, maka Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan

minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk menyamakan dalam pengaktualisasian urusan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka memberikan panduan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kepada masyarakat di daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penyusunan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta berpedoman pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Wajib Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Sampai saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta masih merumuskan target pencapaian SPM tingkat kabupaten, sehingga target acuan SPM yang dilaksanakan di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta berpedoman pada target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam laporan ini, analisa kemampuan dan potensi pencapaian target SPM ini

didasarkan pada data statistik dan informasi lain yang akurat dan bersumber dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 144, TLNRI Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;



8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Wajib Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

### **C. Kebijakan Umum**

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 disebutkan bahwa arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 merupakan strategi dan teknik pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta.

Adapun yang menjadi Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 adalah **“PURWAKARTA BERKARAKTER“**, sedangkan misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta adalah Misi Kedua Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu : **“Pengembangan Struktur Wilayah dan Tata Ruang Yang Berorientasi Pada Keutuhan Lingkungan Baik Hulu Maupun Hilir Serta Unsur Tanah, Air Udara dan Matahari “**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terbagi atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Khusus dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, Urusan Wajib dan Urusan Pilihan terbagi kedalam kelompok Urusan Utama dan Urusan Pendukung. Urusan Utama diartikan sebagai urusan pemerintahan yang menopang langsung terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan **9 Tangga Cinta Purwakarta Istimewa**, sedangkan Urusan Pendukung merupakan urusan pemerintahan yang mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan 9 Tangga Cinta Purwakarta Istimewa.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2013-2018 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan lanjutan yang dirumuskan dalam "**9 Tangga Cinta Purwakarta Istimewa**" yang terdiri atas :

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian bantuan modal peternakan / modal usaha.
2. Perlindungan jaminan kesehatan, hari tua dan kematian bagi seluruh masyarakat, peningkatan kualitas puskesmas rawat inap dan pembentukan Bank Gizi di setiap puskesmas.
3. Pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berbasis kearifan lokal yang bernilai religiusitas melalui pengenalan baca tulis Al-Qur`an sejak dini, integrasi pendidikan dasar 9 tahun, penguatan nilai 7 hari istimewa, pendidikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah sampai tingkat SLTA, beasiswa bagi siswa / mahasiswa berprestasi istimewa, optimalisasi bantuan kelembagaan

- sosial dan keagamaan sebagai basis ketahanan kultur / tradisi serta peningkatan kualitas hidup para pendidik tradisi (guru ngaji, muazin, imam jum`at, khotib dan lain-lain).
4. Pengembangan sistem pertanian organik di 17 kecamatan yang terintegrasi dengan sistem kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan energi serta penguatan pusat pengobatan tradisional dan lumbung obat tradisional di Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, Kiarapedes dan Darangdan.
  5. Penyempurnaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, jaringan listrik, drainase perkotaan serta pengembangan sistem dan jaringan air bersih siap minum bagi masyarakat.
  6. Pengembangan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis perdesaan melalui penguatan Sistem E - Government sampai tingkat RT, Penguatan peran desa sebagai basis otonom Negara melalui program investasi desa, serta Peningkatan kualitas hidup Kepala Desa / Perangkat Desa, Bamusdes, LPM, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Linmas, Kader Posyandu, Kadus, RW dan RT.
  7. Pengembangan program investasi melalui penguatan dan pembukaan kawasan industri baru meliputi Kecamatan Bungursari, Campaka, Cibatu, Babakan Cikao, Jatiluhur, Sukatani, Plered, Tegalwaru, serta pengembangan Kawasan Kota Hijau (*Green City*) di Kecamatan Pondoksalam, Sukatani, Darangdan, Bojong dan Wanayasa.

8. Pengembangan Purwakarta sebagai Kabupaten Pariwisata melalui penataan ruang publik, penataan bangunan perkantoran, penataan kawasan GOR Purnawarman, penyempurnaan Masjid Agung Purwakarta, pengembangan pusat kuliner berbasis tradisi, penataan kawasan perdagangan ciri khas Purwakarta Kecamatan Sukatani dan Bungursari, pengembangan Jatiluhur, Sukasari, Tegalwaru, Sukatani, sebagai daerah pariwisata berbasis hutan dan air, penataan Situ Bungursari, penyempurnaan kawasan Situ Buleud, Situ Wanayasa, Situ Cikumpay, Situ Cigangsa, serta Penataan Kawasan Wisata Hutan Cirende, Wanawali dan Cibukamanah.
9. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Pasar Tradisional Leuwipanjang, Maniis, Sukatani, Bojong, Wanayasa, Pasawahan, Darangdan, Cibatuh dan Campaka serta Penyempurnaan penataan pusat perbelanjaan Pasar Jumat.

Berdasarkan urusan wajib yang menjadi ruang lingkup Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta, terdapat beberapa prioritas pembangunan yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan, yaitu prioritas 1, 5, 7 dan 8. Dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2018 terdapat beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai target prioritas pembangunan tersebut.

Strategi dan kebijakan terkait pelaksanaan program kegiatan yang menyangkut Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih  
Kebijakan:

- Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal dan Perpipaan
  - Mengamankan Sumber Air
2. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas RTH, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota
- Kebijakan:
- Membangun/Merevitalisasi Taman dan Jalur Hijau, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota
  - Mempertahankan Kualitas Taman dan Jalur Hijau
  - Mempertahankan Kualitas Ornamen Kota
3. Meningkatkan Kondisi Sirkulasi Internal Lingkungan Permukiman
- Kebijakan:
- Membangun dan Memperbaiki Jalan Lingkungan
4. Meningkatkan Kondisi Sanitasi Lingkungan Permukiman
- Kebijakan:
- Membangun dan Memperbaiki Sistem Drainase Lingkungan
  - Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Pengolahan Limbah
5. Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasaran Lingkungan
- Kebijakan:
- Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Menyediakan dan Memelihara Sarana Prasarana Lingkungan
6. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Kebijakan:

- Memfasilitasi Penyediaan dan Perbaikan Tempat Tinggal Bagi Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah

7. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Pedoman Pemanfaatan Ruang

Kebijakan:

- Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Publik

8. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Yang Telah Ditetapkan

Kebijakan:

- Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan Penertiban Rekomendasi IMB
- Mengintensifkan Pemantauan dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang

Dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib yang termasuk dalam Misi 2 yaitu **“Pengembangan Struktur Wilayah dan Tata Ruang Yang Berorientasi Pada Keutuhan Lingkungan Baik Hulu maupun Hilir Serta Unsur Tanah, Air Udara dan Matahari”**, maka kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan misi 2 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal dan Perpipaan.
2. Mengamankan Sumber Air.
3. Membangun/Merevitalisasi Taman dan Jalur Hijau, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota.

4. Mempertahankan Kualitas Taman dan Jalur Hijau.
5. Mempertahankan Kualitas Ornamen Kota.
6. Meningkatkan Jumlah Lampu Hias Pada Ruang Publik dan Jalur Perlintasan Strategis.
7. Membangun dan Memperbaiki Jalan Lingkungan.
8. Membangun dan Memperbaiki Sistem Drainase Lingkungan.
9. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Pengolahan Limbah.
10. Meningkatkan Luasan TPU Yang Dikelola Pemda.
11. Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Menyediakan dan Memelihara Sarana Prasarana Lingkungan.
12. Memfasilitasi Penyediaan dan Perbaikan Tempat Tinggal Bagi Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
13. Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Publik.
14. Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan Penertiban Rekomendasi IMB.
15. Mengintensifkan Pemantauan dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang.
16. Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan
17. Tertata dan Terpeliharanya Taman sebagai Penghijauan Kota
18. Terkelolanya Tempat Pemakaman Umum ( TPU ) Dengan Baik
19. Terlaksananya Pemasangan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum ( PJU )
20. Terlaksananya Penataan dan Penertiban Reklame



#### **D. Arah Kebijakan**

Mengacu kepada Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta maka orientasi dan komitmen dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dan menjadi usulan yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA). Usulan prioritas dalam Renja tersebut kemudian dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum lingkup keciptakaryaan dan penataan ruang serta urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penentuan program prioritas dimaksud dengan mempertimbangkan keterbatasan alokasi dana dan urgensi yang diformulasikan ke dalam arah dan kebijakan, dimana di dalamnya terdiri dari tujuan pelaksanaan program, sasaran yang hendak

dicapai dan indikator pencapaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program.

Adapun program yang menjadi prioritas dimaksud sebagaimana Tujuan dan Sasaran pada tabel berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-						
				1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Melalui Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Aparatur.	Jumlah pelayanan administrasi per kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan dan dipelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		2 Meningkatkan Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			3 Meningkatkan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Prosentase disiplin kerja pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2	Mewujudkan Keunggulan Kawasan Permukiman dan Kawasan Strategis Daerah Yang Berbasis Nilai Kearifan Lokal dan Berorientasi Semangat Kompetisi Global	1	Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik	Jumlah RTH, Fasilitas Publik, dan Ornamen Kota Yang Dibangun/ Direvitalisasi	-	5	5	5	5	5
		2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan	Presentase RTH yang terpelihara (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Persentase RW Yang Jalan Lingkungannya Dibangun/ Diperbaiki (%)	-	8	8	8	8	8
		3	Tersedianya Hunian yang layak bagi seluruh masyarakat	Persentase Daerah Genangan Yang Tertangani (%)	-	4	4	4	4	4
				Rasio Ketersediaan TPU milik pemda	-	500	500	500	500	500
Rasio Rumah Layak Huni (%)	0	0	0	0	0	0				
3.	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat		Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat	Persentase Desa Rawan Air Bersih (%)	1	1	1	1	1	1

4.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan (%)	-	30	40	50	60	70
			Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (%)	-	100	100	100	100	100
			Lama Proses Pengesahan Rencana Tapak/Perbitan Rekomendasi IMB (Hari)	-	-	-	-	-	-
5.	Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan (%)	-	-	-	-	1	1

## **BAB II**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **A. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

##### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat : persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
2. Penyediaan air minum : persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman;
3. Penyediaan sanitasi : persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun;
4. Penataan Bangunan dan Lingkungan : persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;
5. Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan : persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
6. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi : persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI);

7. Izin Usaha Jasa konstruksi : persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap;
8. Informasi Penataan Ruang : persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital;
9. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik : persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

**1. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM  
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :**

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN
			INDIKATOR	NILAI	
1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	1	persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	2019
2	Penyediaan air minum	2	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	81,77 %	2019
3	Penyediaan sanitasi	3	persentase penduduk yang terlayani sistem air	60%	2019

			limbah yang memadai		
		4	persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	50%	2019
				50%	2019
4	Penataan Bangunan dan Lingkungan	5	persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	60%	2019
5	Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	6	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%	2019
6	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	7	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota	60%	2019

			pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)		
7	Izin Usaha Jasa konstruksi	8	persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	100%	2019
8	Informasi Penataan Ruang	9	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	2019
9	Penyediaan Ruang Terbuka	10	persentase tersedianya	50%	2019



	Hijau (RTH) Publik		luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		
--	--------------------	--	--	--	--

## 2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh OPD dalam mencapai selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh OPD.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		NILAI
			INDIKATOR	
1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	1	persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%
2	Penyediaan air minum	2	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	81.77%
3	Penyediaan sanitasi	3	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60%
		4	persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak	50%

			terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	50%
4	Penataan Bangunan dan Lingkungan	5	persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	60%
5	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	6	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%
6	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	7	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	60%
7	Izin Usaha Jasa Konstruksi	8	persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	60%
8	Informasi Penataan Ruang	9	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%
9	Penyediaan Ruang Terbuka	10	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah	50%

	Hijau (RTH) Publik		kota/kawasan perkotaan	
--	-----------------------	--	---------------------------	--

### 3. Realisasi

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET DAERAH 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)
			INDIKATOR		
1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	1	persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100	74,03
2	Penyediaan air minum	2	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	81,77	27,39
3	Penyediaan sanitasi	3	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60	76,56
		4	persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	50 50	50 50
4	Penataan Bangunan	5	persentase jumlah Izin	100	78,96

	dan Lingkungan		Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan		
5	Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	6	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10	57,95
6	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	7	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	60	0
7	Izin Usaha Jasa konstruksi	8	persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	60	0
8	Informasi Penataan Ruang	9	persentase tersedianya informasi	100	95

			mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital		
9	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	10	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	50	96,70

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

- a. PNS;
- b. Non-PNS.

No	Unit Kerja	Pendidikan					PNS/Non PNS	
		S3	S2	S1	Diploma	< Diploma	PNS	Non-PNS
1.	Sekretariat	1	2	3	-	8	14	11
2.	Tabang		2	7	-	2	11	5
3.	Taperwas		-	7	3	4	14	3
5.	Taman		2	2	-	19	23	135
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>62</b>	<b>160</b>

## **6. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- a. Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian.
- b. Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM.
- c. Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (output/outcome) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- d. Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
- e. Belum sinerginya upaya implementasi SPM.
- f. Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.
- g. Belum tersedianya data base yang akurat di setiap urusan.
- h. Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun.

## **B. Bidang Perumahan Rakyat**

### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Rumah Layak Huni dan Terjangkau : Cakupan ketersediaan rumah layak huni, Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
- b. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung Dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) : Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang didukung dengan PSU.

**2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	
		INDIKATOR	NILAI		
1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2025
		2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2025
2	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung Dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang didukung dengan PSU	100%	2025

**3. Target Pencapaian SPM**

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh OPD dalam mencapai selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh OPD.

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TAHUN 2025
		INDIKATOR		
1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%
		2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%
2	Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%

#### 4. Realisasi

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET DAERAH 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)
		INDIKATOR			
1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	35,8
		2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70	50
2	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung Dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	100	30



## 5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

## 6. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

- a. PNS;
- b. Non-PNS.

No	Unit Kerja	Pendidikan					PNS/Non PNS	
		S3	S2	S1	Diploma	< Diploma	PNS	Non-PNS
1.	Sekretariat	1	2	3	-	8	14	11
2.	Bidang Perumahan dan Permukiman		3	3	1	5	12	6
3.	UPTD Rusunawa		-	1	-	1	2	-
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>17</b>

## 7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- a. Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian.
- b. Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM.

- c. Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (output/outcome) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- d. Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
- e. Belum sinerginya upaya implementasi SPM.
- f. Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.
- g. Belum tersedianya data base yang akurat di setiap urusan.
- h. Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun.

### **BAB III**

#### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
			<b>66.081.285.506</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>5,930.230.000</b>
1		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,000,000
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	50,000,000
3		Penyediaan jasa kebersihan kantor	24,000,000
4		Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,000,000
5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,000,000
6		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000
7		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000
8		Penyediaan Makanan dan Minuman	25,000,000
9		Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	

10		Penyediaan Jasa Tenaga PTT	728,380,000
11		Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	33,000,000
12		Festival Purwakarta Istimewa	25,000,000
13		Penyediaan Extra Fooding Bagi Petugas Lapangan (PNS, PTT, THL)	156,800,000
14		Pemberian Insentif Pegawai Lapangan	159,000,000
15		Pengadaan Kalender 2018	-
16		Penyediaan Petugas THL Taman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4,346,400,000
17		Penyediaan Extra Fooding Bagi Petugas Lapangan (PNS, PTT, THL) (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	82,650,000
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>2,243,199,650</b>
1		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	121,170,000
2		Pengadaan mebeleur	157,375,000
3		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	1,445,748,300
4		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25,000,000
5		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	65,000,000

6		Pengadaan Peralatan Teknis Pertamanan	200,000,000
7		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	128,906,350
8		Pengadaan Server dan Jaringan komputer	100,000,000
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>225,000,000</b>
1		Pengadaan pakaian kerja lapangan	150,000,000

2		Pengadaan pakaian Olah Raga	75,000,000
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>25,000,000</b>
1		Pendidikan dan Pelatihan Formal	25,000,000
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>250,000,000</b>
1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000
2		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	25,000,000
3		Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	25,000,000
4		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	25,000,000

5		Penyusunan Pelaporan Penerapan SPM Bidang Keciptakarya dan Penataan Ruang	25,000,000
6		Penyusunan Himpunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Urusan Tata Rusng dan Permukiman	25,000,000
7		Penyusunan Propil dan Website Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	75,000,000
<b>VI.</b>	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>		<b>214,660,000</b>
1		Pembangunan Drainase Kabupaten Purwakarta	200,000,000
2		Pembangunan Drainase Kecamatan Perkotaan (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	14,660,000

<b>VII.</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>		<b>492,858,746</b>
1		Monitoring Pengelolaan Air PAM Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	50,000,000
2		Penyediaan Sarana Air Bersih Kabupaten Purwakarta (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	442,858,746
<b>VIII.</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>		<b>4,022,476,000</b>

1		Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	100,000,000
2		Monitoring Penyelenggaraan Perumahan	50,000,000
3		Penyusunan SIMPERKIM	200,000,000
4		Penyusunan DED Kawasan Kumuh Perkotaan Purwakarta Rusunawa Kabupaten Purwakarta	400,000,000
5		Dana Pendamping RUTILAHU Provinsi	100,000,000
6		DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK Fisik Tahun 2018)	2,999,336,000
7		Penataan Emplacement Belakang Rusunawa (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	86,578,000
8		Penataan Emplacement Depan dan Bangunan Pos Jaga (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	86,562,000

<b>IX.</b>	<b>Program Pemberdayaan komunitas Perumahan</b>		<b>148,052,000</b>
1		Monitoring Kotaku	148,052,000
<b>X.</b>	<b>Program Pembangunan dan Penataan Ruang Publik</b>		<b>28,047,417,260</b>

1		Penataan Alun alun Kecamatan Sukasari	250,000,000
2		Perencanaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan	150,000,000
3		Lanjutan Pembangunan Rumdin A. Yani	200,000,000
4		Lanjutan Pembangunan Masjid Raya Bungursari	1,500,000,000
5		Penataan Emplasement dan Jalan masuk Gedung Kantor	200,000,000
6		Pemeliharaan Bangunan Pendopo dan Bangunan Kantor Situ Wanayasa	350,000,000
7		Pembangunan Kantor dan Rumah Dinas Jabatan di Desa Dangdeur	3,500,000,000
8		Pembangunan Mesjid Raya Bungursari (Lanjutan)	8,045,493,960
9		Pembangunan masjid Raya Bungursari (APBD T.A.2017)	8,027,288,800
10		Lanjutan Penyempurnaan Kawasan kantor kecamatan Campaka (APBD T.A.2017)	752,454,500
11		Rehabilitasi dan Penataan kantor KPU (APBD T.A.2017)	539,793,000
12		Penyempurnaan Gedung Bale Linuhung (APBD T.A.2017)	667,769,000
13		Pembangunan Menara Wisata Kecamatan Sukasari (APBD T.A.2017)	1,872,878,000



14		Penyempurnaan Kantor Kelurahan Nagri kaler	200,000,000
15		Lanjutan Penataan Gapura Kota	400,000,000
16		Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	6,850,000
17		Rehabilitasi dan Penataan Kantor KPU (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	38,590,000
18		Penataan Kawasan Kantor Kecamatan Sukatani (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	6,825,000
19		Lanjutan Penyempurnaan Penataan Kawasan Kantor Kecamatan Campaka (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	34,562,000
20		Penyempurnaan Gedung Bale Guru Linuhung (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	49,511,000
21		Lanjutan Gedung Bale Sawala Syariah (Gedung Dawah) (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	6,975,000
22		Lanjutan Penataan Kawasan Kantor Kecamatan Sukasari (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	15,251,000
23		Pembuatan Gapura Gerbang Kantor Kecamatan Purwakarta (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	6,950,000
24		Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Jl. A. Yani (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	28,490,000

25		Penataan Gapura Kota (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	15,482,000
26		Pembangunan Pagar Markas Brimob (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	28,145,000
27		Pembangunan Kantor Dinas Pangan Pertanian (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	43,395,000
28		Pembangunan Menara Wisata Kecamatan Sukasari (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	48,455,000
29		Pemagaran Kantor Polsek Wilayah Kota (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	181,236,000
30		Emplacement Halaman Kantor Polsek Wilayah Kota (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	181,023,000
31		Rehabilitasi Rumah Dinas Jabatan Siliwangi	200,000,000
32		Pengadaan Sarana dan Prasarana Mesjid Raya Bungursari	500,000,000
<b>XI.</b>	<b>Program Keselamatan Gedung dan Bangunan</b>		<b>537,979,850</b>
1		Monitoring dan Pemeriksaan SLF	50,000,000
2		Monitoring dan Pemeriksaan IMB	50,000,000
3		Sosialisasi IMB	50,000,000
4		Pengadaan Alat Penunjang Optimalisasi IMB (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	139,480,000

5		Sosialisasi IMB (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	198,499,850
6		Biaya Penunjang Operasional Tim Analisa Bangunan Gedung (TABG)	50,000,000
<b>XII</b>	<b>Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan</b>		<b>6,178,767,000</b>
1		Pembangunan/Peningkatan/Rahabilitasi Jalan Lingkungan Menuju Sekolah Kabupaten Purwakarta	2,350,000,000
2		Pembangunan/Peningkatan/Rahabilitasi Jalan Lingkungan Perkotaan Kabupaten Purwakarta	3,200,000,000
3		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perkotaan (penyelesaian kegiatan tahun 2017)	182,958,000

4		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Menuju Sekolah (penyelesaian kegiatan tahun 2017)	445,809,000
<b>XII</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>		<b>1,250,000,000</b>
1		Review Kajian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwakarta	250,000,000
		Review Kajian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Plered	250,000,000

2		Review Kajian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bungursari	250,000,000
3		Review Kajian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wanayasa	250,000,000
		Review Kajian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Campaka	250,000,000
<b>XIV</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum</b>		<b>2,219,050,000</b>
1		Identifikasi Program SANIMAS	50,000,000
2		Operasional Water Treatment Plan (WTP)	200,000,000
3		DAK Bidang Air Minum (DAK Fisik Tahun 2018)	1,969,050,000
<b>XV.</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>		<b>425,000,000</b>
1		Pemeliharaan dan Sewa Billboard Purwakarta Istimewa Km 86 dan Bilboard Km 72 A Tol Cipularang	375,000,000
2		Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Teknis Penertiban dan Pembongkaran Reklame	50,000,000
<b>XVI.</b>	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>		<b>100,000,000</b>
1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Sirnaraga (TMP)	100,000,000
<b>XVII</b>	<b>Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan</b>		<b>400,000,000</b>

	<b>Umum (PJU)</b>		
1		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Perdesaan	200,000,000
2		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Lampu Perkotaan	200,000,000
<b>XVII I</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>		<b>7,471,595,000</b>
1		Pemeliharaan RTH	375000000
2		Pemeliharaan Lampu Hias Lampion	150000000
3		Pemeliharaan Taman Situ Buleud	200,000,000
4		Pemeliharaan Lampu Taman	25,000,000
5		Pemeliharaan Taman Baca	125,000,000
6		Pemeliharaan Lampu Hias Tirai	100,000,000
7		Pengadaan Pompa Air	50,000,000
8		Penataan Taman Tangga Cinta (Lanjutan)	200,000,000
9		Penataan Gerbang Taman Cilodong	400,000,000
10		Penataan Taman Tangga Cinta (APBD T.A.2017)	2307800000
11		Pemeliharaan Peralatan Mekanikal Elektrikal Kawasan Situ Buleud (APBD T.A.2017)	670079000
12		Pengadaan, Pemasangan Lighting dan Sound System Kawasan Situ Buleud (APBD T.A.2017)	775786000

13		Penataan Lampu Hias Lampion Karakter (Lanjutan) (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	188093000
14		Pemeliharaan Lampu Hias Lampion (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	186175000
15		Rehabilitasi Instalasi Lampu Hias Lampion dan Lampu Hias Taman (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	96481000
16		Pembuatan Sumur Resapan di Taman Surawisesa (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	46900000
17		Pemeliharaan Taman Batas Kabupaten (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	188800000
18		Pemeliharaan Taman Batas Kota (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	188500000
19		Pemeliharaan Taman Cimaung dan Ciherang (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	187850000
20		Pemeliharaan Lampion Perdesaan (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	189431000
21		Pembuatan Taman Pertigaan Marancang Jalan Baru (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	194240000
22		Rehabilitasi dan Pengecatan Tugu Keramik (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	144195000
23		Penataan Taman Patung Kujang Jl. Siliwangi (Lanjutan) (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	10290000
24		Penataan Taman Tangga Cinta (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	95505000

25		Pemeliharaan Peralatan Mekanikal Elektrikal Kawasan Situ Buleud (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	46300000
26		Pengadaan, Pemasangan Lighting dan Sound System Kawasan Situ Buleud (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	97000000
27		Pembuatan Taman Surawisesa (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	43230000
28		Pembuatan Taman Gapura Batas Kota (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	42900000
29		Lanjutan Pembangunan Tribun Situ Buleud (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	97120000
30		Pembuatan Taman Jalan Tengah (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	16640000
31		Pembuatan Taman Cipaisan (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	16640000
32		Pembangunan Taman Parcom (Penyelesaian Kegiatan Tahun 2017)	16640000
<b>XIX.</b>	<b>Program Fasilitas Administrasi Umum Pertanahan</b>		<b>5,900,000,000</b>
1		Pengadaan Tanah Ganda Negara	2,500,000,000
2		Pembebasan lahan untuk saluran Pipa Transmisi	1,400,000,000
3		Pembelian Tanah Dalam Rangka Penataan dan Perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikolotok Purwakarta (Banprov Tahun 2018)	2,000,000,000

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Umum Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta merupakan laporan yang disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran hasil capaian, evaluasi permasalahan dan upaya-upaya yang telah dilakukan termasuk pembiayaan sehingga dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya keberhasilan pencapaian target SPM pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta yang menangani 2 (dua) bidang SPM yaitu Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Perumahan Rakyat akan tercapai apabila didukung oleh para pemangku kebijakan dan para pelaksana kebijakan, juga tidak kalah penting adalah dukungan dari masyarakat sebagai pengguna pelayanan yang diharapkan adanya masukan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat.

Namun demikian dalam capaian hasil SPM tersebut terlepas dari kompleksitas permasalahan baik eksternal maupun internal serta harus dapat menyesuaikan dan menjembatani antara kebijakan yang bersifat populis dengan sistematis, kegiatan yang bersifat fisik dengan nonfisik, serta permasalahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan



Ruang serta Bidang Perumahan Rakyat dalam pembangunan yang semakin kompleks, berlangsung pesat, dan tidak menentu.

Demikian Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta yang dapat kami sampaikan, kami berharap dengan laporan ini akan lebih memacu dan meningkatkan kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta yang ke depan tantangannya akan semakin besar. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan meridhoi kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aamiin